

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PAKET LAYANAN KOMPLIT
(PAKLAY ONLINE ADMINDUK) KABUPATEN KARANGANYAR
(Studi Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di Desa Paulan Kecamatan Colomadu)**

*The Implementation of the rules of Karanganyar Major Number 23 in 2020 year
concerning the Karanganyar Regency Complete Adminduk Service Package.
(Study of Making Services Birth Certificate in Paulan Village, Colomadu District)*

Gustin Ayu Putri Wijaya, Dr. Aris Tri Haryanto, M.Si, Dra. Sri Riris Sugiyarti, M.Si
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

gustinayupw@gmail.com, aristh68@gmail.com, ririss68@gmail.com

Abstrak

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Paket Layanan Komplit Adminduk Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk mempercepat pelayanan, mempermudah prosedur dan mekanisme penyampaian dokumen kependudukan kepada seluruh penduduk, mencegah pajak ilegal, mencegah calo, mempermudah pelayanan yang baik bagi masyarakat terkait dokumen kependudukan. Mempromosikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya terutama pengelolaan administrasi kependudukan hingga administrasi yang tepat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Paket Layanan Komplit Online Adminduk Kabupaten Karanganyar di Desa Paulan. Teori yang digunakan untuk mendukung analisis ini adalah model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn, yang meliputi langkah dan tujuan kebijakan dasar, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan implementasi, karakteristik lembaga eksekutif, situasi ekonomi, sosial dan politik dan kecenderungan pelakunya.

Metode penelitian yang digunakan untuk mendukung implementasi Paket Layanan Komplit Adminduk Kabupaten Karanganyar adalah metode studi kualitatif. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode Purposive Sampling dan Snowball Sampling dalam memilih informan. Teknik pengumpulan data merupakan kombinasi dari beberapa teknik yang berbeda seperti studi pustaka, wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.

Penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan Paket Layanan Komplit Adminduk Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan secara efektif namun masih terdapat beberapa kekurangan yaitu Paklay Online Adminduk sendiri sebenarnya dapat diakses secara mandiri. Namun masyarakat masih belum memiliki pemahaman yang baik dan kurangnya informasi yang diterima tentang peraturan tersebut dikarenakan sosialisasi pemerintah yang kurang memadai serta kesadaran penduduk yang masih kurang dalam mengurus administrasinya sendiri.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Kecenderungan Pelaksana.

Abstract

Regent Regulation Number 23 of 2020 concerning the Karanganyar Regency Complete Adminduk Service Package aims to accelerate services, simplify procedures and mechanisms for submitting population documents to the entire population, prevent illegal taxes, prevent middlemen, facilitate good service for the community related to population documents. Promoting services according to the needs of the community so that the community can meet their needs, especially the management of population administration to proper administration.

This study aims to implement a Complete Service Package Online Adminduk Karanganyar Regency in Paulan Village. This study aims to implement the Regent's Regulation Number 23 of 2020 regarding the Complete Service Package (Paklay Online Adminduk) Karanganyar Regency in Paulan Village. The theory used to support this analysis is the policy implementation model developed by Van Metter and Van Horn, which includes basic policy steps and objectives, policy resources, inter-organizational communication and implementation activities, characteristics of executive institutions, economic, social and political situations and propensity of the perpetrator.

The research method used to support the implementation of the Karanganyar Regency Adminduk Complete Service Package is a qualitative study method. Therefore, the writer uses purposive sampling and snowball sampling in selecting informants. Data collection techniques are a combination of several different techniques such as literature study, interviews, direct observation and documentation.

This study concludes that the implementation of the Karanganyar Regency Adminduk Complete Service Package has been implemented effectively but there are still some shortcomings, namely that the Paklay Online Adminduk itself can actually be accessed independently. However, the public still does not have a good understanding and the lack of information received about the regulation is due to inadequate government socialization and lack of awareness of the population in managing their own administration.

Keywords: Policy Implementation, Population Administration Services, Implementing Tendency.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka terwujudnya pelayanan kebijakan yang baik kepada masyarakat untuk memasuki era globalisasi terutama di masa pandemi yang terus berlanjut dengan berbagai perubahan masyarakat, birokrasi perlu perubahan dan pembangunan yang disertai dengan perkembangan baru yang diharapkan mampu mengubah khalayak persepsi birokrasi pemerintah yang terkadang memiliki prosedur yang panjang bahkan proses yang relatif lambat. Salah satu

perubahan dan pembenahan yang perlu dilakukan adalah reformasi administrasi yang dilakukan dengan berbagai upaya yang pada akhirnya dapat menimbulkan perubahan mulai dari sistem manajemen, sumber daya, organisasi dan praktik manajemen.

Pelayanan publik merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait yang memiliki tujuan untuk mencukupi berbagai kebutuhan masyarakat. Contoh pelayanan publik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat adalah

Administarsi Kependudukan yang berada di bawah pengawasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Penduduk. Pada pelaksanaanya, pelayanan pengelolaan kependudukan memegang peranan penting dalam mewujudkan efisiensi sehingga penduduk merasa puas ketika menerima pelayanan, khususnya pengelolaan kependudukan.

Seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 29 Desember 2006, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini merupakan salah satu Undang-Undang yang mengatur tentang dokumen kependudukan. Bukti kependudukan ini meliputi biodata kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

Dengan jumlah penduduk 3.186 jiwa, Desa Paulan diharapkan dapat menjadi desa perintis penyelenggaraan pengelolaan adminduk yang berkualitas, efisien dan efektif. Salah satu jenis pelayanan yang sangat penting adalah akta kelahiran, hal ini dikarenakan akta kelahiran merupakan dokumen hukum dari peristiwa kelahiran seseorang yang dikemudian hari dapat menjadi dasar pelayanan lainnya. Proses pembuatan akta kelahiran yang kerap kali dilaksanakan secara langsung masih dianggap kurang maksimal dikarenakan sangat tidak efisien waktu, sehingga masih

banyak pihak ketiga (perantara) yang terlibat.

Pelaksanaan proses akta kelahiran tidak hanya untuk pencetakan saja, tetapi juga digunakan sebagai pementuan basis data setiap warga atau penduduk dengan data-data yang sangat penting, sehingga masyarakat wajib melaporkan kelahiran ke kantor pelaksana di tempat kelahiran tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Akta kelahiran sendiri berfungsi untuk memenuhi persyaratan Administrasi Kependudukan. Dalam menyikapi implementasi kebijakan, birokrasi memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pelaksana kebijakan serta keterampilan dan keahlian terutama dalam pengelolaannya.

Dalam keadaan seperti ini terutama di masa pandemi, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan peraturan mengenai Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) yang disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tanggal 12 Maret 2020. Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) merupakan peningkatan kualitas layanan yang efektif dan efisien. Maksud dan tujuan peraturan ini adalah untuk mempercepat penyampaian semua dokumen kependudukan, menyederhanakan metode dan mekanisme penyampaian semua dokumen kependudukan, mencegah terjadinya pajak-pajak yang tidak sah dalam pengurusan dokumen kependudukan, dan membatasi perantara dalam kepengurusan dari dokumen kependudukan serta memberikan pelayanan prima yang

bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pembuatan dokumen kependudukan serta dapat mengurangi mobilitas kerumunan masyarakat.

Untuk terus dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas maka perlu dilakukan suatu pengukuran terhadap implementasi Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) Kabupaten Karanganyar ini. Dimana langkah pengukuran ini diharapkan nantinya dapat mengungkapkan akar dari permasalahan yang terjadi di lapangan, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat khususnya pada pelayanan Dokumen Kependudukan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan Paket Layanan Komplit Adminduk Online di bidang akta kelahiran yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan dan pemerintahan desa kepada masyarakat desa Paulan dengan judul:

'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PAKET LAYANAN KOMPLIT (PAKLAY ONLINE ADMINDUK) KABUPATEN KARANGANYAR (STUDI PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DESA PAULAN KECAMATAN COLOMADU).'

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) Kabupaten Karanganyar di Desa Paulan?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) Kabupaten Karanganyar di Desa Paulan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam suatu penelitian teori memegang peranan yang krusial, pada dasarnya teori memberikan refleksi tentang suatu gejala atau peristiwa yang telah terjadi. Pada dasarnya suatu teori harus dikaitkan dengan penelitian yang menyangkut pada topik permasalahan yang diajukan untuk diteliti. Dimana teori yang disajikan mempunyai daya dukung terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kebutuhan teori harus disesuaikan dengan kajian topik suatu permasalahan yang akan diteliti.

Pengertian teori secara umum menurut William Wiersma (dalam Sugiyono 2012: 52) Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Dengan demikian jelas bahwa teori mempunyai peran penting yang dapat memberikan penjelasan teoritis tentang fenomena sosial yang menjadi permasalahan penelitian serta lebih memberikan penjelasan tentang keterkaitan beberapa variable dalam penelitian yang ingin diteliti.

Pengertian implementasi sendiri kerap digunakan oleh para praktisi untuk menggambarkan tahapan-tahapan implementasi kebijakan. Namun, masih belum ada konsensus di antara para ahli itu sendiri mengenai definisi konseptual implementasi. Hal ini bisa terjadi karena yang disebut dengan implementasi sendiri merupakan fase yang kompleks dan rumit. Meskipun tidak mudah untuk secara definitif mendefinisikan batas-batas implementasi, namun mendefinisikan apa batasan implementasi untuk tujuan analitis adalah penting.

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijaksanaan dan kebijaksanaan, kita ketahui bahwa kedua istilah ini memiliki arti yang sangat mirip, kedua kata itu memiliki banyak kesamaan dan memiliki perbedaan yang sangat sulit untuk diidentifikasi dan digunakan secara bergantian. Menurut PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) yang dikutip oleh Abdul Wahab (2001:2) dalam bukunya Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara mengemukakan kebijaksanaan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas. longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-

aktivitas tertentu atau suatu rencana.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam siklus kebijakan publik implementasi kebijakan adalah salah tahap yang krusial. Pelaksanaannya sendiri seringkali dipandang hanya sekedar melaksanakan apa yang diputuskan oleh badan pembuat keputusan atau legislatif, seolah fase ini memiliki pengaruh yang kurang. Padahal pada kenyataannya fase implementasi memiliki pengaruh yang sangat penting dikarenakan kebijakan sendiri tidak ada gunanya apabila tidak diimplementasikan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi adalah tahapan di mana kebijakan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya agar dapat mewujudkan tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan selalu mempunyai setidaknya 3 (tiga) unsur pokok yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Unsur terakhir ini seringkali ibelum didefinisikan secara detail serta birokrasi sendiri yang harus menerjemahkan sebagai program aksi dan proyek.

3. Model Implementasi

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (Winarno 2012: 158) Model ini membentuk sebuah abstraksi yang mencakup kaitan antara beberapa faktor yang memberi pengaruh pada hasil atau kinerja kebijakan, beberapa norma dan tujuan yang harus dicapai oleh para pelaku kebijakan.

Menurut model ini, Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab 2005: 78) menunjukkan bahwa hubungan

antara kecerdasan dan prestasi kerja dipisahkan oleh beberapa variabel independen yang relevan. Variabel bebas tersebut adalah:

a. Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan.

Variabel ini dilandaskan terhadap tujuan utama dari berbagai faktor yang menentukan kinerja suatu kebijakan. Identifikasi indikator kinerja menurut Van Meter dan Van Horn merupakan tahapan penting dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator kinerja ini dapat menilai sejauh mana kebijakan dan tujuan kebijakan mendasari keputusan kebijakan secara keseluruhan.

Dalam hal ini, tujuan dilaksanakannya Paket Layanan Komplit Adminduk Kabupaten Karanganyar adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan desa dan mendekatkan pelayanan dengan apa yang dibutuhkan penduduk sehingga dapat terwujud pelayanan yang efektif dan efisien dalam pembuatan Akta Kelahiran yang digunakan sebagai identitas yang paling penting dari populasi penduduk suatu negara.

b. Sumber Kebijakan.

Selain langkah pokok dan maksud kebijakan, dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan sumber daya yang tersedia harus diberi perhatian. Sumber disini memiliki maksud sebagai dana yang mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan yang efektif, sumber-sumber kebijakan yang mendukung

terwujudnya implementasi kebijakan patut mendapat perhatian. Dalam tindakan nyata pelaksanaan program, seringkali kita mendengar para pelaksana kebijakan mengemukakan bahwa mereka tidak mempunyai pembiayaan yang cukup untuk program - program yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan pelayanan Paket Layanan Komplit Adminduk Kabupaten Karanganyar sendiri telah dijelaskan bahwa pembiayaan kebijakan ini diambil dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

c. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan.

Komunikasi dalam suatu organisasi dan antar organisasi terkait merupakan proses yang kompleks dan sulit. Ketika menyampaikan instruksi dalam satu organisasi atau dari satu organisasi ke organisasi lain, apabila sumber informasi yang tidak sama ditransmisikan, akan menyebabkan makna yang tidak sesuai dengan pola dan tujuan, maka pembuat dan pelaksana kebijakan akan lebih sulit dalam menerapkan kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan Paket Layanan Komplit Adminduk Kabupaten Karanganyar juga harus menyeimbangkan berbagai kegiatan seperti kunjungan, evaluasi program, tinjauan tata kelola, audit keuangan dan mekanisme yang mencakup laporan kepala desa yang dibuat

agar dapat menjadi mengawasi unit pemerintah desa.

- d. **Karakteristik Badan Pelaksana.**
Pada karakteristik lembaga pelaksana sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2012) terlihat dalam pembahasan ini tidak terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi didefinisikan sebagai ciri, aturan, dan pola hubungan yang terjadi beberapa kali dalam suatu badan eksekutif yang memiliki hubungan nyata dengan apa yang dimilikinya dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
- e. **Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.**
Dampak kondisi ekonomi, sosial dan politik terhadap kebijakan publik telah mendapat sorotan khusus selama dekade terakhir. Menurut Van Meter dan Van Horn, beberapa faktor tersebut kemungkinan besar akan berpengaruh besar terhadap kinerja badan pelaksana.
- f. **Kecenderungan Pelaksana (Implementors).**
Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa tingkat tendensi pelaksana akan memberi pengaruh terhadap kinerja kebijakan. Pelaksana kebijakan yang mempunyai pilihan negatif secara terbuka dapat menciptakan sikap yang bertentangan dengan tujuan program. Apabila hal ini terlaksana, maka permasalahan implementasi dapat menimbulkan perdebatan. Selain itu, perilaku yang lemah dapat mengakibatkan pelaksana

mengelak dan membelokkan perhatian secara tidak terang - terangan.

Dalam kondisi seperti ini, Van Meter dan Van Horn memberi saran agar masyarakat memperhatikan peran pengawasan dan implementasi guna memberikan penjelasan mengenai perbedaan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Maka dari itu, peninjau pelaksana kebijakan dituntut untuk mengumpulkan individu - individu yang berasal dari berbagai elemen kecenderungan.

Indikator pencapaian tersebut dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh langkah landasan dan tujuan kebijakan telah dilaksanakan. Langkah-langkah dan tujuan dasar ini berfungsi untuk menjabarkan seluruh tujuan dari keputusan kebijakan. Akan tetapi dalam banyak kasus tidak mudah untuk mengidentifikasi dan mengukur suatu pencapaian

4. Paket Layanan Komplit Adminduk

Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karanganyar meluncurkan terobosan baru untuk memudahkan penduduk Kabupaten Karanganyar dalam mengelola adminduk melalui mesin Anjungan Dukcapil Mandiri dan Aplikasi Paket Layanan Komplit (Paklay) Adminduk. Basis data kependudukan sendiri sudah tersedia di Disdukcapil Karanganyar, sebelum menggunakan layanan ini masyarakat dapat meminta PIN atau QR Code dari petugas pelaksana kebijakan melalui nomor WA 08112957751. Selain itu masyarakat juga dapat mengunduh aplikasi

Paklay Komplit melalui google play. Inovasi ini dapat menjadi jawaban atas tuntutan perkembangan pelayanan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, mengingat akan dapat diakses masyarakat melalui aplikasi online dengan cara yang relatif mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Paket Layanan Komplit ini mempunyai tujuan untuk memfasilitasi percepatan seluruh layanan dokumen kependudukan, menyederhanakan tata cara dan mekanisme pelayanan seluruh dokumen kependudukan, mengantisipasi pemungutan ilegal, mencegah calo, dan memberikan pelayanan prima untuk memudahkan masyarakat memiliki dokumen kependudukan.

5. Pengertian dan Fungsi Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah hasil pencatatan kelahiran seseorang. Sampai saat ini, masih terdapat banyak penduduk Indonesia yang identitasnya bahkan tidak tercatat di akta kelahiran, dan secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini dapat mengakibatkan anak dilahirkan tidak terdaftar nama, garis keturunan, dan kewarganegaraannya serta tidak memiliki perlindungan. Dimulai dengan memanipulasi identitas anak, semakin mudah untuk merekayasa identitas anak, sehingga semakin mudah mengeksploitasi anak, banyak anak yang akan menjadi korban perdagangan, perburuhan dan kekerasan.

Hal penting yang harus dimiliki warga negara adalah akta kelahiran. Akta kelahiran

merupakan persoalan yang sangat universal dan mendasar karena berkaitan dengan identitas diri dan status kewarganegaraan. Akta kelahiran juga merupakan hak seseorang atas identitas sebagai wujud dari Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karena akta kelahiran dikaitkan dengan pengakuan negara atas status sipil seseorang, akta kelahiran bersifat universal. Dari perspektif Konvensi Hak Anak, negara harus menyediakan pemenuhan hak-hak dasar setiap anak, dan menjamin perlindungan terhadap kelangsungan, pertumbuhan dan perkembangan anak.

Akta kelahiran memiliki sejumlah manfaat dan makna penting, antara lain sebagai bukti bahwa negara mengakui identitas seseorang yang menjadi warga negara, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas pertama seorang anak, sebagai data penting bagi pemerintah. Sebagai langkah awal mempersiapkan anggaran penduduk di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak yang digunakan menjadi bukti yang sangat kuat bahwa anak memperoleh hak waris dari orang tuanya, mencegah penipuan usia, perkawinan di bawah umur, tindakan kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual, anak secara hukum berhak atas perlindungan dan kesehatan pendidikan, tempat tinggal dan hak-hak lain sebagai warga negara.

Fungsi akta kelahiran bagi negara adalah untuk memperoleh

data akurat tentang anak di seluruh Indonesia untuk perencanaan dan penyusunan statistik negara yang mencerminkan demografi, kecenderungan dan karakteristik penduduk, serta arah perubahan sosial yang akan terjadi. Bagi yang telah melewati 60 (enam puluh) hari setelah 1 (satu) tahun, tetap dapat menerbitkan akta kelahiran jika disetujui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika sudah lebih dari 1 (satu) tahun, harus dikukuhkan oleh pengadilan yang memakan biaya.

6. Syarat dan Proses Pembutan Akta Kelahiran

Pelayanan Dokumen Kependudukan Akta Kelahiran secara langsung di Kelurahan memiliki beberapa persyaratan dokumen yaitu sebagai berikut :

- a. Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil (F2.01) ditandatangani dan distempel Desa/Kelurahan.
- b. Surat Kelahiran asli dari Dokter/Bidan/Penolong.
- c. Kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan Orang Tua. Apabila tidak ada diganti dengan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami-Istri
- d. KK Orang Tua
- e. KTP-el Orang Tua
- f. KTP-el Pelapor dan 2 Orang Saksi

Jangka waktu pengisian dan penyelesaian Dokumen Kependudukan secara langsung secepatnya 1 (satu) bulan setelah dokumen berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, hal ini dikarenakan aparat pemerintah desa tidak membawa berkas ke Dispendukcapil setiap hari.

Adapun alur proses pendaftaran Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) Kabupaten Karanganyar di Kelurahan yaitu sebagai berikut :

- a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan setempat dengan membawa surat pengantar RT/RW dan berkas persyaratan lengkap:

- 1) Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil (F2.01) ditandatangani dan distempel Desa/Kelurahan.
- 2) Surat Kelahiran asli dari Dokter/Bidan/Penolong.
- 3) Kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan Orang Tua. Apabila tidak ada diganti dengan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami-Istri
- 4) KK Orang Tua
- 5) KTP-el Orang Tua
- 6) KTP-el Pelapor dan 2 Orang Saksi

- b. Setelah seluruh berkas sesuai dengan persyaratan lengkap, Petugas Seksi Pemerintahan pada Kelurahan memproses Surat Keterangan Kelahiran. Petugas Seksi Pemerintahan pada Kelurahan menginput data register akta kelahiran dan mengunggah dokumen pendukung ke dalam aplikasi Paklay Online.

- c. Setelah data pada aplikasi Paklay Komplit sudah terverifikasi dan tervalidasi dalam SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) akan mendapat pemberitahuan data sudah terverifikasi dan kapan akan dikirim ke

Kelurahan melalui Whats App android Desa.

- d. Dokumen asli yang sudah dilegalisasi dikirim oleh Pos Indonesia dengan biaya administrasi Rp. 10.000,-

Jangka waktu pengisian dan penyelesaian Dokumen Kependudukan secara online Paklay Komplit Adminduk secepatnya 1 (satu) jam dan selambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) Kabupaten Karanganyar” merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif.

Untuk memperoleh pengertian yang lebih kompleks dan mendalam tentang situasi sosial yang diteliti, dengan menggunakan teknik pengumpulan triangulasi dan berbagai teknik pengumpulan data gabungan atau stimulus. Analisis data dilakukan secara induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dibentuk hipotesis atau teori darinya. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang disusun secara mendalam dan mempunyai makna terkandung. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi melainkan pemaknaan.

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipergunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya untuk memperoleh informasi dan data yang relevan dengan apa yang penting untuk dibahas dalam penelitian. Dalam

menentukan lokasi penelitian, peneliti memutuskan melakukan penelitian ini di Kantor Kelurahan Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karangnyar.

Dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) Kabupaten Karanganyar (Studi Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Desa Paulan Kecamatan Colomadu) memakai teknik Purposive Sampling dan Snowball.

Purposive Sampling yaitu pengambilan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Informan yang dimaksud disini adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya.

Snowball sampling menjadi pilihan penulis dikarenakan sedikitnya jumlah sumber data yang tidak mampu memberikan data yang memuaskan, kemudian mencari orang lain dan dapat menggunakannya sebagai sumber data. Sehingga jumlah sampel sumber data akan meningkat, seperti bola salju yang bergulir, dan seiring waktu menjadi semakin besar.

Dalam penelitian ini informan yang digunakan penulis adalah :

- a. Sekertaris Desa Paulan, Trias Murdo Handiko, SS
- b. Kepala Urusan Pelayanan Kelurahan Paulan, Bambang Subagyo, Amd
- c. Kepala Urusan Pemerintahan Kelurahan Paulan, Noer Hidayah, Amd
- d. Masyarakat, Ibu Dewi, Ibu Kusmin, Daru Priambudi, Rohmat Budi Nugroho, Ibu Rahayu Febri Riyanti, Ibu Maharani Indah Dwi Pertiwi, dan Ibu Marmi

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa pengumpulan data dari berbagai sumber yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan Paklay Komplit untuk pembuatan akta kelahiran, yaitu:

a. Kepustakaan

Teknik ini dilaksanakan dengan cara membaca dan mempelajari buku perpustakaan yang berhubungan dengan materi.

b. Wawancara

Peneelitan ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, susunan wawancara tidak terstruktur dalam penelitian ini tidak disusun dalam bentuk kuesioner, tetapi hanya berupa poin-poin utama yang diperkenalkan dan dikembangkan informan selama wawancara. Hal ini memiliki maksud agar proses wawancara mengalir secara natural dan mendalam, seperti yang diharapkan oleh penelitian kualitatif.

c. Observasi Langsung

Observasi atau pengamatan yang dilaksanakan terhadap obyek penelitian dilokasi penelitian ini yaitu di Desa Paulan. Pengamatan ini meliputi kegiatan yang dilakukan terhadap pelaksana proses pelayanan pendaftaran Akta Kelahiran sampai pencetakan data Akta Kelahiran.

d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini berkaitan langsung dengan apa yang penulis lakukan pada saat pengumpulan data di lokasi penelitian berupa laporan kependudukan, laporan kepala rumah tangga, dan sejenisnya.

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak penulis melaksanakan kegiatan selama

pengumpulan data sampai penelitian selesai. Analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Mathew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johny Saldoria dari Miles & Hubermen (2014:12), yang menerapkan tiga faktor penting selama proses kegiatan, antara lain:

a. Kondensasi Data (Data Condensation)

Pemadatan data berdasarkan pada proses memilah, menyederhanakan, mengabstraksi, dan/atau mentransformasikan data yang diperkirakan seluruh aspek catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan pengorganisasian, pengumpulan informasi yang mengarah pada agitasi dan tindakan. Menyajikan data yang dapat membantu pemahaman tentang apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, termasuk analisis mendalam atau mengambil tindakan yang didasarkan pada pemahaman tersebut. Setelah didapatkan kemudian dianalisis, direfeksi dan disajikan dalam bentuk tulisan.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing)

Analisis ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan "final" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir,

tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Paulan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Wilayah desa Paulan mempunyai luas 97,6810 Ha. Desa Paulan merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Gawan
Kecamatan Colomadu

Sebelah Selatan : Desa Singopuran
Kecamatan Kartasura Kabupaten
Sukoharjo

Sebelah Barat : Desa Malangjiwan
Kecamatan Colomadu

Sebelah Timur : Desa Gajahan
Kecamatan Colomadu

Luas Desa Paulan seluas 97,681 ha, yang terdiri atas :

- a. Persawahan : 50,0063 ha
- b. Tanah bukan sawah
 - Permukiman : 44,9497 ha
 - Kuburan : 0,3000 ha
 - Perkantoran : 0,2666 ha
 - Lainnya : 2,1584 ha

Berdasarkan topografi, Desa Paulan mempunyai karakter wilayah yang sama terletak pada ketinggian antara 123 mdpl dari permukaan laut, sedangkan jenis

iklim yang ada di desa Paulan adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata 27°C, dan suhu maksimum bisa mencapai 37° C. Secara administratif desa Paulan mempunyai 4 (empat) Dusun dengan jumlah RW sebanyak 10 (sepuluh) dan jumlah RT sebanyak 35 (tiga puluh lima).

Wilayah Desa Paulan yang berada di daerah dataran rendah dan area pinggiran perkotaan tidak mempunyai sumber daya alam yang relatif banyak. Sumber daya alam di Desa Paulan hanya wilayah persawahan dengan hasil pertanian yang menonjol adalah padi. Jenis tanah yang liat juga tidak cocok untuk ditanami palawija.

Kondisi perekonomian khususnya industri yang maju dan berkembang pesat membuat desa Paulan ditekan untuk dapat terus mengoptimalkan potensi desa, pada nyataannya desa Paulan memiliki kondisi tanah yang subur, sehingga perekonomian desa bergerak di bidang pertanian, industri tempe dan perdagangan.

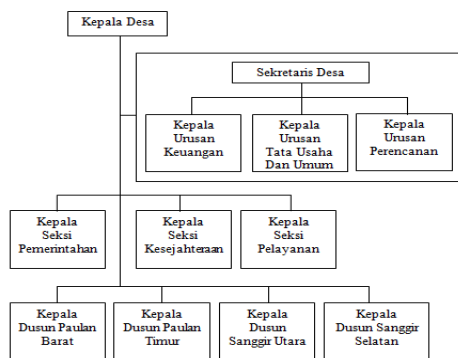
Potensi sumber daya sosial di Desa Paulan yaitu adanya Karang Taruna, Kelompok Pengajian, Kelompok Arisan, PKK, Posyandu, Kelompok Kesenian dan lain-lain. Keadaan pemerintahan desa terkait dengan Kepala Desa beserta bantuan aparatur desa lainnya.

Dalam menjalankan fungsi sebagai pemerintahan desa yang dibantu oleh para perangkat desa. Berikut merupakan susunan pemerintahan kantor kelurahan desa Paulan:

**STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA PAULAN
KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR**

- a. Kepala Desa : Drs. Joko Margono, MM
- b. Sekretaris Desa : Trias Murdo Handiko, SS
- c. Kaur Keuangan : Arif Nunirawan, ST
- d. Kaur Tata Usaha : Retno Ayu Widowati
- e. Kaur Perencanaan : Wakhid Joko Raharjo, SE
- f. Kaur Pemerintahan : Noer Hidayah, A.Md
- g. Kaur Pelayanan : Bambang Subagyo, A.Md
- h. Kaur Kesejahteraan : Muchlis Hidayat
- i. Kadus Paulan Barat : Dewi Sekti Muninggar
- j. Kadus Paulan Timur : Riyadi, S.Sos
- k. Kadus Sanggir Utara : Syarifuddin Ibnu Alfatah
- l. Kadus Sanggir Selatan : Iksan Pujowardoyo, A.Md

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA PAULAN
KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR**



Keterangan:
 _____ : garis komando

2. Hasil Penelitian

Penelitian mengenai implementasi Paket Layanan Komplit Online Adminduk Kabupaten Karanganyar di Desa Paulan, penulis lebih banyak mendapatkan data berupa kata - kata, sumber data utama yang penulis peroleh berasal dari informan yang diwawancarai. Sumber data utama dicatat dalam catatan tertulis atau menggunakan alat perekam suara yang digunakan penulis selama proses wawancara.

Selain data berupa kata-kata, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data dari dokumentasi di Kantor Kelurahan desa Paulan, kecamatan Colomadu, studi kepustakaan, dan juga dokumentasi yang diperoleh penulis dengan mengamati bentuk catatan lapangan penulis serta foto kondisi objek penulis. Penulis mempergunakan foto sebagai data dokumentasi dikarenakan foto dapat menghasilkan data deskriptif yang berharga dan kerap dipergunakan untuk meneliti dan menganalisis objek yang penulis teliti.

Selain itu, dikarenakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penulis secara bersamaan melakukan kegiatan analisis data dalam proses pengumpulan data. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan John, yaitu tiga kegiatan penting yang dilakukan selama proses pengumpulan data, diantaranya Kondensasi data (data condensasi), Penyajian data (data display) dan Verifikasi (verification).

Dalam penelitian mengenai implementasi Paket Layanan Komplit Online Adminduk Kabupaten Karanganyar di Desa Paulan ini, informan yang diidentifikasi oleh penulis adalah orang - orang yang menurut penulis mempunyai informasi yang diperlukan untuk penelitian ini, dikarenakan para informan terus-menerus bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti di kehidupan sehari-hari mereka.

Perlu diketahui bahwa informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang diantaranya :

TABEL 1
DAFTAR NAMA -NAMA INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Trias Murdo Handiko, SS	Sekretaris Desa
2.	Noer Hidayah, A.Md	Kepala Urusan Pemerintahan
3.	Bambang Subagyo, Amd	Kepala Urusan Pelayanan
4.	Ibu Dewi	Masyarakat Paulan Timur
5.	Ibu Kusmin	Masyarakat Paulan Timur
6.	Ibu Rahayu Febri Riyanti	Masyarakat Paulan Barat
7.	Ibu Maharani Indah Dwi Pertiwi	Masyarakat Paulan Barat
8.	Daru Priambudi	Masyarakat Sanggir Selatan
9.	Rohmat Budi Nugroho	Masyarakat Sanggir Utara
10.	Ibu Marmi	Masyarakat Sanggir Utara

Sumber : Penulis, 2021

Kebijakan pelaksanaan pelayanan dalam pembuatan Akta Kelahiran di Desa Paulan berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2020 tentang Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) Kabupaten Karanganyar ini adalah kebijakan yang dibuat oleh Bupati Karanganyar dan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar.

Implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis, dimana pelaksana implementasi menjalankan tindakan atau kegiatan yang pada akhirnya dapat mencapai sesuatu yang selaras dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa esensi pelaksanaan adalah serangkaian kegiatan yang tersusun dan berurutan yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana berdasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Bentuk tindakan dari pelaksanaan kebijakan tentang Paklay Online Adminduk adalah dengan melakukan pelaksanaan pelayanan administrasi dengan kualitas pelayanan yang maksimal. Kebijakan tersebut memiliki tujuan agar masyarakat mudah dalam mengurus administrasi kependudukan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara efektif dan efisien, perlu mendekatkan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak berdampak negatif bagi masyarakat.

Dampak buruk yang dimaksudkan oleh pemerintah antara lain penyimpangan administrasi, yaitu belum terciptanya basis data kependudukan yang tepat pada tingkat kabupaten/kota dan pusat. Tanpa akta kelahiran, pemalsuan usia, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual, mencegah adanya dokumen kependudukan berlipat dan palsu, serta proses yang melenceng dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Sama halnya di dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di desa Paulan Kabupaten Karanganyar, terkait dengan penyimpangan administrasi, hal inilah yang dikeluhkan oleh masyarakat Desa Paulan pada saat melakukan pembuatan Akta Kelahiran yaitu banyaknya syarat dokumen yang diberikan, dipersulit dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal ini menyebabkan banyak penduduk menjadi malas untuk membuat Akta Kelahiran dan lebih memilih menitipkan kepada perangkat desa yang bisa terima jadi walaupun membayar dan lama.

Kemudian sehubungan dengan pengimplementasian pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Desa Paulan, berdasar dari hasil pendataan yang dilaksanakan oleh petugas pelaksana setiap penduduk wajib memiliki Akta Kelahiran, pada kenyataannya ternyata masih adanya beberapa warga yang belum memiliki Akta Kelahiran. Hal tersebut disebabkan adanya penduduk yang telat melaporkan kelahiran lebih dari 60 hari sehingga dalam pembuatannya terkena denda yang tinggi. Selain itu masyarakat

yang tidak memiliki Akta Kelahiran tersebut masih menggunakan Surat Kelahiran dan berlaku di instansi - instansi tertentu. Sehingga masyarakat tidak mengurusnya lagi untuk membuat Akta Kelahiran.

Dengan adanya program Paklay Online Adminduk yaitu pelayanan administrasi masyarakat desa dan kelurahan ini diharapkan hal ini dapat berdampak positif baik bagi pemerintah, salah satunya pemerintah lebih dimudahkan dalam mendata masyarakat yang baru lahir. Selain itu, diharapkan masyarakat puas dengan pelayanan dan fasilitas yang diberikan perangkat desa sehingga masyarakat tertib administrasi.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) Kabupaten Karanganyar (Studi Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Desa Paulan Kecamatan Colomadu), Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau memotivasi keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan ini.

Menurut Van Metter dan Van Horn ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan implementasi ini, yaitu pengukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik serta kecenderungan para pelaksana.

Sebenarnya proses pembuatan akta kelahiran sendiri dapat dengan mudah diproses apabila telah memenuhi seluruh persyaratan yang

telah ditentukan sebelumnya seperti, surat pengantar dari RT, Kartu Keluarga Asli, Surat Kelahiran dari Rumah Sakit, Fotokopi KTP-el kedua orang tua, Fotokopi KTP-el 2 orang saksi, Fotokopi buku nikah orang tua, dan tidak terlambat melaporkan maksimal 60 hari setelah lahir.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan pada penelitian ini kemudian dilakukan analisis data.

1. Ukuran - ukuran dasar dan tujuan - tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan tersebut berfungsi untuk mengatur pelaksanaan kebijakan yang memiliki tujuan agar sejalan dengan program yang telah disusun. Selain itu, bagaimana realisasi atau tindakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati tersebut.

Kebijakan tersebut memang dirumuskan untuk menciptakan kelancaran administrasi, mempercepat masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan mencegah dampak negatif dari tidak memilikinya Akta Kelahiran yang sering terjadi saat dan sangat merugikan pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien merupakan tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, dinyatakan bahwa kesimpulan tentang manfaat dan tujuan penerapan kebijakan Paklay Online Adminduk adalah:

- a. Untuk mewujudkan tertib administrasi
- b. Mempercepat pelayanan berkas kependudukan
- c. pencegahan pajak ilegal saat hendak mengurus dokumen berkas kependudukan
- d. Mengantisipasi adanya oknum perantara saat hendak mengurus dokumen kependudukan
- e. Menyelenggarakan pelayanan optimal dengan tujuan mempermudah masyarakat memperoleh dokumen kependudukan.

Pelaksanaan konkrit pemerintah juga telah dilakukan untuk menunjang tujuan tersebut yaitu seperti :

- a. Perbaikan fasilitas pelayanan

Hal ini diperkuat dari hasil observasi dan dokumentasi yaitu dengan memperbaiki fasilitas pelayanan agar masyarakat nyaman dalam pengurusan akta kelahiran.

Dari hasil pendokumentasian dan informasi yang diperoleh, terlihat bahwa peningkatan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa berupa fasilitas area tunggu dengan membuat sekat pembatas antara masyarakat dengan pelaksana pelayanan, penyediaan TV dan pengeluaran formulir bentuk baru yang digunakan untuk mempermudah pelayanan pembuatan akta kelahiran.

- b. Penerapan pelayanan one day service

Penerapan ini memang bertujuan untuk mempermudah pelayanan di Kabupaten Karanganyar sehingga masyarakat lebih memiliki waktu yang panjang terutama dalam mengurus administrasi kependudukan.

- c. Pembuatan Akta Kelahiran tidak dipungut biaya.

Dalam program mendukung berjalannya kebijakan Paklay Online Adminduk pemerintah kabupaten Karanganyar juga memberikan kebijakan bahwa dalam kepengurusan administrasi kependudukan masyarakat tidak dipungut biaya apapun hal ini bertujuan untuk meringankan masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Sehingga berdasarkan ukuran dan tujuan kebijakan, pelaksanaan implementasi harus sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2020 tentang Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) Kabupaten Karanganyar di Desa Paulan.

2. Sumber - Sumber Kebijakan

Sumber daya kebijakan patut mendapat sorotan khusus dikarenakan dapat mendukung kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Sumber yang dibahas meliputi dana yang memotivasi dan merangsang implementasi yang efektif. Dalam praktik

pembuatan kebijakan, seringkali kita mendengar pejabat dan pembuat kebijakan mengatakan bahwa kita tidak memiliki cukup dana untuk membelanjakan program-program yang telah direncanakan. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, besarnya dana dapat menjadi faktor penentu kesuksesan implementasi kebijakan.

Di dalam implementasi sumber daya pokok lainnya adalah staf atau pegawai. Kurang memadainya staf atau staf di bidangnya dapat menyebabkan kegagalan yang kerap kali terjadi dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu lingkup atau cakupan daerah implementasi juga perlu diperhitungkan pada saat akan menentukan pegawai pelaksana kebijakan. Misalnya, memberikan pelatihan pegawai, sehingga pegawai memiliki keterampilan dasar untuk melayani masyarakat.

Fasilitas fisik juga menjadi unsur krusial dalam pelaksanaan kebijakan. Jika tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana yang mumpuni, implementasi kebijakan juga memiliki kemungkinan akan gagal, meskipun pelaksana implementasi memiliki staf pelaksana yang memadai, pemahaman tentang apa yang harus dilakukan, dan kewenangan.

Dalam implementasi kebijakan, sudah menjadi hal yang wajar bahwa pembuat kebijakan membutuhkan sarana pendukung untuk keberhasilan kebijakan. Serta perbaikan ruang

tunggu, komputer dan jaringan internet. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan ini akan menghambat proses pemberian layanan, terutama penerbitan akta kelahiran

Perbaikan fasilitas dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan tujuan agar masyarakat nyaman dalam mengurus administrasi kependudukan selain itu untuk mewujudkan pelayanan yang kualitasnya lebih baik sangat diperlukan fasilitas yang mendukung.

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya kesimpulan yang telah dipaparkan menyebutkan bahwa antara sumber dana, sumber daya manusia dan fasilitas harus terpenuhi agar pelaksanaan implementasi dapat mencapai suatu keberhasilan. Masyarakat juga berharap agar kualitas pelayanan perangkat desa Paulan semakin memuaskan.

Hasil analisis sumber kebijakan Pelayanan Adminduk Online Paklay di Desa Paulan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Pegawai
- b. Peningkatan fasilitas fisik yang didukung oleh APBD sebagai sumber daya untuk pembelian dan pemeliharaan peralatan fisik relatif bagus dibanding dengan tahun sebelumnya. Sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah desa yaitu berupa:

- 1) Pembaharuan fasilitas tunggu dengan

pembuatan sekat pembatas antara masyarakat dan petugas pelayanan

- 2) Pemasangan TV untuk ruang tunggu yang sebelumnya tidak tersedia untuk suasana yang lebih nyaman saat menunggu

- 3) Serta membuat formulir baru untuk dipergunakan dalam pelayanan Akta Kelahiran.

c. Sumber dana

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2020 tentang Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) Kabupaten Karanganyar Pasal 9 biaya penyelenggaraan peraturan tersebut diambilkan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Seperti yang telah dipaparkan oleh Sekertaris Desa Bapak Trias Murdo Handiko, SS bahwa dalam pelaksanaan pemerintah Kabupaten Karanganyar tidak memberikan anggaran khusus. Sedangkan, dalam pelaksanaan administrasi kependudukan sendiri untuk masalah dana tidak ada masalah karena biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kebijakan ini sendiri tidak terlalu besar. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pemberian pelayanan yang

maksimal kepada masyarakat.

Oleh karena itu, diharapkan dapat mendorong terselenggaranya pelayanan masyarakat yang efektif dan nyaman terhadap masyarakat.

3. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan - kegiatan pelaksanaan

Komunikasi merupakan suatu proses tindakan yang digunakan untuk menyampaikan apa yang mengungkapkan apa yang orang lain pikirkan atau rasakan. Komunikasi dapat dikatakan sebagai faktor yang sangat krusial dalam proses implementasi kebijakan dikarenakan pada setiap proses tindakan pasti melibatkan unsur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Implementasi yang efektif hanya dapat dipahami oleh pembuat kebijakan dan eksekutif, dan ini hanya dapat dicapai melalui komunikasi yang baik. Dalam hal ini komunikasi yang baik dan terkoordinasi harus dipastikan supaya tidak terjadi gangguan komunikasi yang akan menimbulkan masalah dalam kinerja pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam memberikan informasi pemerintah perlu melakukan beberapa cara yaitu dengan dilakukannya sosialisasi. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang program Paket Layanan Komplit Online Adminduk, sehingga masyarakat lebih memahami adanya Paklay Online Adminduk tersebut.

Pada implementasi sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah desa Paulan kepada masyarakat sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Dengan banyaknya cara yang digunakan oleh pemerintah dalam melakukan sosialisasi agar penduduk dapat mengetahui maksud dan tujuan dari penerapan kebijakan Paklay Online Adminduk. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Desa, Desa Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Bapak Trias Murdo Handiko, SS. Beliau mengatakan bahwa sosialisasi yang diberikan pemerintah Kabupaten kepada masyarakat sudah menggunakan berbagai cara. Akan tetapi masih banyaknya masyarakat yang kurang paham mengenai informasi yang disampaikan pemerintah mengenai terkait program Paklay Online Adminduk, khususnya terkait dalam pembuatan Akta Kelahiran dan hanya beberapa warga yang mengetahui mengenai pelayanan tersebut.

Dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan hanya pada pertemuan RT, PKK dan lainnya dirasa masih kurang efektif karena dalam pertemuan tersebut masyarakat terkadang sering tidak hadir sehingga sosialisasi tidak menyeluruh.

Dalam kegiatan - kegiatan para pelaksana keberhasilan kebijakan Perbub Karanganyar tentang Paklay Online Adminduk juga harus diimbangi dengan Kegiatan seperti kunjungan, evaluasi program, peninjauan

kembali pada bidang administrasi dan pada bidang pengelolaan, dan mekanisme yang mencakup laporan Kepala desa yang dibuat untuk memantau unit Pemerintah desa harus seimbang.

Berdasarkan wawancara masyarakat sebagai penerima layanan dari pemerintah desa, dalam membuat akta kelahiran banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara jelas oleh pemerintah, yang seharusnya masyarakat berhak memperoleh informasi tentang Paklay Online Adminduk. Pemerintah harus memberikan pengetahuan yang mendalam tentang Paklay Online Adminduk agar masyarakat mengetahui tujuan dari Paklay Online Adminduk dan perlu evaluasi khusus terhadap program tersebut.

Komunikasi antar instansi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Paklay Online Adminduk di Desa Paulan Kecamatan Colomau Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan Pelayanan Paklay Online Adminduk sosialisasi pelaksanaan Pelayanan Adminduk Online Paklay di desa Paulan sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam pemberian informasi tentang Pelayanan Paklay Online Adminduk telah melalui beberapa cara. Akan tetapi meski sudah dilaksanakan penyuluhan, informasi yang mustinya disampaikan pada warga

masih belum sampai pada warga, hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan beberapa informan yang belum paham tentang Paklay Online Adminduk. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat yang jelas tentang apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat serta bagaimana tata cara pelaksanaan pelayanan Paklay Online Adminduk.

- b. Kegiatan seperti kunjungan program dan evaluasi sudah dilakukan. Namun kunjungan untuk evaluasi secara keseluruhan tidak dilakukan khusus untuk Paklay Online Adminduk. Untuk kunjungan khusus Pelayanan Paklay Online Adminduk sendiri belum pernah dilakukan.
4. Karakteristik Badan Pelaksana

Dalam pelaksanaan kebijakan Paklay Online Adminduk karakteristik badan pelaksana menjadi salah satu faktor kunci yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Keberhasilan suatu kebijakan Paklay Online Adminduk ini dapat dicapai apabila organisasi sudah mampu dan siap melayani masyarakat secara efektif dan efisien serta memiliki tenaga pelayanan yang mumpuni, terutama pegawai yang menerbitkan akta kelahiran.

Perangkat desa memang sangat diperlukan kompetensinya karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetapi tingkat

pengawasan Kepala desa sendiri juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Paklay Online Adminduk.

Analisis karakteristik badan pelaksana dalam Pelayanan Paklay Online Adminduk di Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar memiliki hasil sebagai berikut :

- a. Kompetensi, pengetahuan dan kecakapan pelaksana pelayanan desa di Desa Paulan dapat dikatakan baik karena semua pelaksana sudah bisa mengoperasikan komputer tetapi masih belum adanya proporsional tugas. Pengawasan Kepala Desa sudah dilakukan tetapi tidak setiap hari. Pengawasan adalah salah satu faktor penting karena dengan pengawasan dan perhatian yang baik dari pimpinan dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Sehingga dalam pelaksanaan pelayanan Paklay Online Adminduk di Desa Paulan belum maksimal.
 - b. Kedisiplinan pegawai di Desa Paulan bisa dibilang sudah baik, kedisiplinan juga sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan Pelayanan Paklay Online Adminduk.
5. Kondisi - kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Beberapa unsur penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan dalam suatu implementasi yaitu, lingkup ekonomi, sosial dan

politik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik akan menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan penerapan Paklay Online Adminduk. Hal tersebut berdampak besar terhadap diterima atau tidaknya masyarakat terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Dalam implementasi kebijakan, sudah menjadi hal yang wajar bahwa kebijakan mutlak membutuhkan dukungan masyarakat untuk mencapai keberhasilan kebijakan. Dengan adanya Paklay Online Adminduk masyarakat secara umum menerima kebijakan tersebut. Tetapi ada juga beberapa masyarakat yang menganggap kebijakan ini sama saja dengan sebelumnya.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri administrasi kependudukan juga menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi keberhasilan kebijakan Paklay Online Adminduk ini.

Dalam pelaksanaan Pelayanan Paklay Online Adminduk di Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dapat disimpulkan kondisi ekonomi, sosial dan politik masyarakat sebagai berikut :

- a. Dapat dilihat dari kondisi Ekonomi, penduduk Desa Paulan sangat mendukung adanya kebijakan terkini yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dapat dilihat juga berdasarkan latar belakang masyarakat yang kebanyakan bekerja sebagai

- pegawai swasta. Situasi ekonomi yang baik memiliki pengaruh yang besar terhadap situasi sosial dan partisipasi politik di masyarakat. Hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat untuk menerima kebijakan pemerintah yang baru.
- b. Dengan diterapkannya Layanan Adminduk Online Paklay, secara garis besar masyarakat sudah dapat menerima dengan cukup baik. Namun masih ada masyarakat yang belum memahami manfaat dari kebijakan Adminduk Paklay Online serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuat dan mengurus akta kelahiran menjadi faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Paklay Online Adminduk.
 - c. Pembuatannya akta kelahiran dalam pelaksanaan Pelayanan Paklay Online Adminduk apabila sesuai dengan prosedur yang ditetapkan tidak dipungut biaya, tetapi dikenakan biaya ongkos kirim dokumen asli oleh Pos Indonesia sebesar Rp. 10.000,-.
 - d. Tujuan dari berlangsungnya program Paklay Online Adminduk yaitu agar dapat mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan sehingga dapat memenuhi ketentuan taat administrasi.

6. Kecenderungan Para Pelaksana

Dalam implementasi Paket Layanan Komplit Online Adminduk) Kabupaten Karanganyar di Desa Paulan keberhasilan tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kecenderungan para pelaksana.

Pelaksana yang tidak siap untuk mengimplementasikan kebijakan yang ditentukan menciptakan hambatan untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan. Pegawai juga harus mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab terkait yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa agar pegawai mengetahui apa yang harus dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan.

Selain adanya peraturan dasar dalam bekerja perangkat desa juga wajib memahami proses pelayanan pembuatan akta kelahiran, agar tidak ada yang kesalahan pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kecenderungan para pelaksana dalam pelaksanaan Paklay Online Adminduk di Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut:

- a. Pemberian motivasi kepada para pegawai terkait implementasi Paklay Online Adminduk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang disahkan pemerintah daerah, sehingga perangkat desa dapat

- mengetahui apa yang harus dilakukan.
- b. Terdapat pemahaman yang sangat jelas mengenai peran serta fungsi utama masing-masing pelaksana kebijakan serta tanggungjawab masing-masing pelaksana kebijakan desa, walaupun ada yang melakukan tugas ganda. Dalam pelaksanaan Paklay Online Adminduk tidak ada kesulitan dalam pelaksanaan.
 - c. Dengan adanya inovasi Paklay Online Adminduk diharapkan agar kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat semakin meningkat. Hal ini didukung dengan banyaknya masyarakat yang merasa puas terhadap pelayanan yang saat ini telah dilaksanakan dibandingkan dengan pelayanan sebelumnya.

Dengan pernyataan informan diatas dapat disimpulkan masyarakat dirasa sudah puas dengan pelayanan yang perangkat desa Paulan telah berikan, walaupun masih ada sedikit banyak kekurangan dalam pelaksanaan pelayanannya.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Bentuk penerapan dari kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Paket Layanan Komplit Adminduk Kabupaten Karanganyar adalah dengan memberikan pelayanan secara efektif dan efisien terutama dalam pembuatan akta kelahiran.

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut sudah dilaksanakan dengan efektif tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yaitu Paklay Online Adminduk sendiri sebetulnya sudah bisa diakses secara mandiri tetapi kurangnya pemahaman dan informasi yang diterima masyarakat karena kurangnya sosialisasi pelaksana kebijakan kepada masyarakat serta kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk mengurus administrasi sendiri.

Dari hasil analisis penelitian mengenai Paket Layanan Komplit Online Adminduk Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pembuatan akte kelahiran di Desa Paulan Kecamatan Colomadu dapat disimpulkan didasarkan pada teori yang telah dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang merupakan dasar dari teori yang penulis gunakan, yang menguraikan tentang ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, kecenderungan para pelaksana.

Hasil penelitian mengenai ukuran dan tujuan kebijakan dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan Paklay Online Adminduk memiliki tujuan, yaitu untuk mewujudkan tertib administrasi, untuk mempercepat pelayanan, mempermudah prosedur dan mekanisme penyampaian dokumen kependudukan kepada seluruh penduduk, mencegah pajak illegal, mencegah calo, mempermudah

pelayanan yang baik bagi masyarakat terkait dokumen kependudukan. Mempromosikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya terutama pengelolaan administrasi kependudukan hingga administrasi yang tepat.

Sumber daya pegawai Di desa Paulan masih belum mencukupi, kondisi ini menyebabkan kendala yang dapat menghambat dalam pelaksanaan Paklay Online Adminduk di Desa Paulan. Pengadaan fasilitas fisik yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sumber pendanaan pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Paulan yaitu berasal APBD untuk masalah pendanaan tidak ada masalah. Dengan demikian, dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara maksimal.

Komunikasi antar organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Paklay Online Adminduk di Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar sudah baik melalui setiap pertemuan RT, namun tidak berjalan dengan efektif dikarenakan masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengerti dan acuh. Pelaksanaan seperti monitoring kunjungan dan evaluasi program sudah dilakukan, tetapi kunjungan evaluasi keseluruhan bukan kunjungan khusus Paklay Online Adminduk.

Kompetensi, pengetahuan dan kecakapan perangkat desa di Desa Paulan bisa dibilang baik, karena sudah semua mampu mengoperasikan komputer serta

kedisiplinan pegawai di Desa Paulan yang juga sudah baik.

2. Saran

Berdasarkan temuan - temuan tersebut dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Hendaknya perangkat desa Paulan melakukan penambahan sumber daya manusia untuk mempermudah pelaksanaan Paklay Online Adminduk sehingga pegawai tidak memiliki tugas ganda.
- b. Pemerintah Kabupaten Karanganyar hendaknya mengupayakan pemberian sosialisasi tentang manfaat dan tujuan program Paklay Online Adminduk secara terperinci agar implementasi tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, serta meyakinkan bahwa pelayanan Paklay Online Adminduk mempermudah dalam kepengurusan Administrasi kependudukan sehingga masyarakat tertib administrasi.
- c. Pemerintah Kabupaten Karanganyar hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat lagi mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran, memberikan pemahaman tentang tujuan dan pentingnya Akta Kelahiran agar masyarakat mengetahui bahwa pembuatan akta kelahiran tidak berbelit - belit dan mengetahui tujuan adanya Paklay Online Adminduk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. PT. Aksara. Jakarta.

Agus Purwanto, Erwan. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar - dasar kebijakan publik*. Alfabeta. Bandung.

Islamy, M Irfan. 2003. *Prinsip - prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bina Aksara. Jakarta.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonom Daerah*. Insan Cendekia. Surabaya.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. MNC Media. Jakarta.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Jurnal

Ni Made Setiawati Widhiastiti, Ni Nyoman Dewi Pascarani, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti. 2017. *Implementasi Program Pencatatan Akta Kelahiran Berbasis Online (Studi Kasus Program Inovasi Capil Online pada Dinas*

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar). Denpasar. Universitas Udayana.

Setyani, Erna. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Surakarta (Studi Kasus tentang Pengurusan Akta Kelahiran Gratis di Kota Surakarta)*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Sofia Dewi Rosita, Afifuddin, Suyeno. 2020. *Implementasi Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran Berbasis Online (Studi Kasus Inovasi Capil Online pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang)*. Malang. Universitas Islam Malang.

Vivi Elanda Erawati. 2020. *Implementasi Program Paket Hemat (Pahe) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya*. Surabaya. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Sumber lain

Dispendukcapil.karanganyar.go.id
diakses Oktober 2021

Dokumen Desa Paulan tentang data monografi dan kependudukan. Tahun 2021.

Mapping Desa Paulan, Tahun 2021.

Perbup Nomor 23 Tahun 2020 tentang Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) Kabupaten Karanganyar.

Perda Kabupaten Karanganyar nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa

Perbup Karanganyar Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

